

PRODUKSI KOPI DI PRIANGAN PADA ABAD KE-19

Mumuh Muhsin Z.

Departemen Sejarah dan Filologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

This research examines the coffee production in Priangan in the 19th century. The issues that will be revealed in this research are formulated in the following questions: how was the ecological condition of Priangan making it suitable for cultivating coffee crops? How to manage human resources to work on crops of coffee? How was the price of coffee both in local and international market? The answers to these questions become the goal of this research. To work on this study used method of history that includes four stages of work, i.e., heuristic, criticism, interpretation, and historiography.

Keywords: coffee production, Residency Priangan, 10th century

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji produksi kopi di Priangan pada abad ke-19. Masalah-masalah yang akan diungkap dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut: bagaimana kondisi ekologis Priangan sehingga cocok untuk membudidayakan tanaman kopi? Bagaimana mengelola sumber daya manusia untuk mengerjakan tanaman kopi? Bagaimana situasi harga kopi di tingkat lokal dan harga di pasaran internasional? Mengungkap jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi tujuan dari penelitian ini. Untuk mengerjakan penelitian ini digunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Kata-kata kunci: Produksi Kopi, Keresidenan Priangan, Abad ke-19

PENDAHULUAN

Priangan abad ke-19 bukan lagi merupakan *issue* lokal, tapi sudah berada pada kisaran persoalan regional, bahkan mondial. Semua itu dimungkinkan terjadi berkat komoditas yang dihasilkan Priangan yang laku di pasar internasional. Nila (*indigo*), kopi, teh, dan kina merupakan empat produk unggulan yang berasal dari Priangan pada abad ke-19, di samping produk lainnya yang masuk kategori bukan produk unggulan (*minor crops*). Di antara empat produk unggulan tersebut, kopi menempati urutan pertama.

Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ekonomi di Priangan hampir tanpa perubahan, yaitu diberlakukannya sistem eksploitasi yang dikenal dengan sebutan *Preangerstelsel*. Sistem ini berlaku sejak VOC berkuasa pada tahun 1677 hingga tahun 1870 ketika Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal. Bahkan, *Preangerstelsel* menjadi purwarupa bagi sistem eksploitasi ekonomi pada periode 1830-1870, yaitu dengan diterapkannya Sistem Tanam Paksa (*Cultivation System*). Ketika Sistem Tanam Paksa dihapus dan digantikan oleh Sistem Liberal dan diterapkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870, praktik *Preangerstelsel* tidak dihapuskan sepenuhnya, terutama untuk jenis tanaman tertentu, dengan argumen bahwa sistem itu sangat menguntungkan pemerintah kolonial (de Klein, 1931: 74 – 77).

Khusus berkaitan dengan kopi, muncul masalah yang dapat dirumuskan dalam sejumlah pertanyaan berikut: bagaimana kondisi ekologis Priangan sehingga cocok untuk membudidayakan tanaman kopi? Bagaimana mengelola sumber daya manusia untuk mengerjakan tanaman kopi? Bagaimana situasi harga kopi di tingkat lokal dan harga di pasaran internasional? Mengungkap jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi tujuan dari penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab masalah penelitian tersebut di atas dilakukan penelitian dengan menggunakan metode sejarah. Metode ini

meliputi empat tahapan yaitu (1) heuristik, mencari sumber; (2) kritik, mengkritik sumber baik secara eksternal maupun internal; (3) interpretasi, menafsirkan sumber yang sudah lolos kritik; dan (4) historiografi, menuliskan laporan penelitian.

Untuk mengungkap persoalan tersebut di atas tampaknya tidak cukup memadai bila hanya secara deskriptif-naratif yang berkisar pada upaya menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, dan kapan. Jawaban atas pertanyaan bagaimana dan mengapa pun harus dieksplisitkan; dan untuk itu diperlukan penjelasan yang bersifat analitis dan struktural. Bantuan pendekatan ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, dan ilmu politik diperlukan karena kajian historis yang bersifat diakronis saja dianggap tidak cukup. Untuk memperoleh gambaran yang utuh perlu dilengkapi dengan analisis secara sinkronis. Dengan cara ini pula eksplanasi historis yang dihasilkan diharapkan cukup memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Priangan periode kolonial hampir identik dengan penanaman kopi. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa selama hampir dua abad wilayah ini menjadi tempat eksploitasi kolonial melalui tanaman kopi. Lebih dari itu, Priangan pun merupakan tempat pertama kali diperkenalkannya (diujicobakan) tanaman kopi di Pulau Jawa. Kemudian, secara kuantitatif pelaksanaan tanaman kopi di Priangan melibatkan jumlah tenaga kerja dan lahan yang sangat ekstensif, sehingga produksi kopi dari keresidenan ini selalu paling tinggi dibandingkan dengan keresidenan lain di seluruh Pulau Jawa. Di samping itu, untuk kepentingan kopi pula di Keresidenan Priangan diberlakukan sebuah sistem yang sangat lama masa berlakunya, yaitu *Preangerstelsel* dari 1677 tahun hingga tahun 1870 (de Klein, 1931).

Arti penting kopi Priangan bagi keuangan VOC dapat digambarkan sebagai berikut. Pada tahun 1726 VOC menguasai 50% hingga 75% perdagangan kopi dunia. Dari jumlah yang diserahkan VOC itu, sebanyak 4.000.000 pon atau hampir 75%

diproduksi di Priangan. Data lebih lanjut, untuk keuangan Negeri Belanda, pada pertengahan pertama abad ke-19, kopi selalu merupakan produk yang memberikan keuntungan sangat besar. Misalnya, antara 1840 dan 1849 saja diperoleh keuntungan dari kopi sebesar 65 juta gulden; sedangkan dari indigo sebesar 15 juta gulden. Adapun gula sampai tahun 1845 belum menguntungkan. Penyumbang terbesar kopi adalah dari Priangan (Fasseur, 1975: 36). Sebagai produsen utama kopi, posisi Priangan pertama kali tergeser oleh Keresidenan Pasuruan pada permulaan tahun 1860-an. Jumlah lebih rinci produksi kopi antara tahun 1854-1870 di beberapa keresidenan di Jawa terdapat dalam tulisan R.E. Elson (1994) berjudul *Village Java under the Cultivation System 1830-1870*.

Awalnya, kopi diperkenalkan VOC ke daerah Priangan pada permulaan abad ke-18. Kopi pertama kali ditanam tahun 1707. Motivasi yang mendorong VOC menanam kopi di wilayah ini adalah sangat berkaitan dengan kompetisi pasar kopi dunia. Menjelang berakhirnya abad ke-17 permintaan kopi di Eropa meningkat. Merespons kebutuhan kopi untuk pasar Eropa VOC membelinya dari Yaman dalam jumlah yang terus meningkat. Misalnya, pada tahun 1695 dibeli 300.000 sampai 400.000 pon, tahun 1707 dibeli sebanyak 500.000 pon, dan dari tahun 1715 sampai beberapa tahun berikutnya dibeli hampir 1.500.000 pon (Knaap, 1986: 36).

Pembeli kopi dari Yaman, tentu saja, bukan hanya VOC, tetapi juga negara-negara lain seperti Inggris, Turki, dan sebagainya. Akibatnya, persaingan terjadi dan bahkan menajam. Pada gilirannya, harga kopi pun meningkat, sehingga margin keuntungan yang diperoleh VOC mengecil. Oleh karena itu, untuk mengganti posisi Yaman, VOC berupaya mencari wilayah alternatif yang dapat memproduksi kopi dalam jumlah banyak. Didapatkanlah Priangan sebagai tempat yang cocok untuk tanaman kopi. Pada tahun 1723 dilaporkan bahwa di Keresidenan Priangan terdapat hampir

2.141.000 pohon kopi, 1.041.000 di antaranya sedang berbuah. Di Priangan Barat penduduk mulai menanam kopi di tanah milik sendiri dalam skala luas. Priangan Timur dan Tengah segera mengikutinya. Oleh karena itu, sekitar tahun 1725, secara mengejutkan kopi Priangan dapat mengungguli Yaman sebagai pusat utama produksi kopi dunia (Knaap, 1986: 36). Sebagai perbandingan, kopi yang yang dibeli VOC dari Yaman dan Priangan dari tahun 1722 sampai 1728 dapat dilihat tabel 1.

Tabel 1. Jumlah kopi yang dibeli VOC dari Yaman dan Priangan (1722 – 1728) (ton)

Tahun	Yaman	Priangan
1722	832	6
1723	427	36
1724	399	663
1725	228	1.264
1726	277	2.145
1727	264	2.076
1728	0	2.021

Sumber: David Bulbeck *et al.* (comp.). 1998. *Southeast Asian Exports since the 14th Centuries: Cloves, Pepper, Coffee, and Sugar*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, hlm. 144.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana sistem penanaman kopi di Keresidenan Priangan beroperasi sehingga berjalan relatif stabil, paling tidak, hingga pertengahan pertama abad ke-19. Keberhasilan penanaman kopi sangat berkaitan dengan beberapa faktor, antara lain, tanah yang cocok, tersedianya tenaga kerja, harga kopi, persentase penanaman, dan pengawasan.

Ekologi dan Tanah

Untuk keberhasilan tanaman kopi, faktor pertama adalah kecocokan tanah. Prinsipnya, kopi ditanam pada tanah yang masih belum digarap yang jaraknya cukup jauh dari perkampungan penduduk. Ketinggian tanah pun sangat penting; ide-

Tabel 2. Jumlah Pohon Kopi di Kabupaten-Kabupaten Keresidenan Priangan (1832-1864)

Kabupaten	Jumlah Total Pohon				
	1832	1835	1836	1839	1864
Cianjur	13.017.006	19.180.432	24.202.804	24.488.406	13.619.303
Bandung	15.942.158	30.020.550	30.247.200	29.398.100	20.041.750
Sumedang	9.971.177	17.736.760	18.587.093	8.598.230	10.100.360
Limbangan	5.965.989	8.045.155	10.245.845	18.979.676	5.252.983
Sukapura	375.000	6.225.670	10.678.612	5.627.097	2.005.337
Total	45.271.331	81.208.567	93.961.554	87.091.509	51.019.733

Sumber: *Algemeen Verslag (A.V.) Preanger*, 29a/19, 1932; *A.V. Preanger* 36/3, 1835; *A.V. Preanger*, 2/7, 1935; *Preanger Statistiek* 1836, *A.V. Preanger* 7/1, 1837; *A.V. Preanger* 34/1, 1839; *A.V. Preanger* 30/6, 1864.

alnya antara 1.000 sampai 4.000 kaki. P.F.H. Fronberg, seorang ahli kimia pertanian menyatakan bahwa menanam kopi di bawah 1.000 kaki harus dihindari. Pada tanah berketinggian lebih dari 4.000 kaki tanaman kopi bisa produktif lebih lama dan dapat berumur lebih panjang ketimbang yang ditanam di pelataran yang lebih rendah (van Baardewijk, 1994: 161).

Tanaman kopi biasanya terletak di deretan lebih rendah dari tanah yang berbukit-bukit dari kemiringan gunung. Lanskap Priangan didominasi oleh rangkaian pegunungan dan dataran tinggi. Lanskap seperti ini memberikan perlindungan yang baik terhadap tanaman kopi dari tiupan angin laut yang kencang. Priangan yang merupakan wilayah yang belum padat penduduknya memiliki lahan tanah liar yang sangat luas. Kopi sangat baik pada tanah yang baru dibuka dari hutan primer (Knaap, 1986: 44). Oleh karena itu, dapat dipahami jika dalam Laporan Penanaman (*the Cultivation Reports*) tidak pernah disebutkan berapa luas *bau* tanah yang digunakan untuk tanaman kopi. *Bau* merupakan unit ukuran luas, kira-kira sama dengan 500 *Rijn roeden*² atau 7096,5 m² atau 1,7587 *acre* (ukuran Inggris) (*Maten en Gewichten van Nederlandsch Oost-Indie handboek voor cultuur en handels-ondernemingen in nederlandsch indie*, 1914).

Di Keresidenan Priangan sendiri, tanah yang cocok untuk tanaman kopi tidak sama untuk tiap daerah. Priangan

Barat merupakan areal utama produksi kopi, kemudian diikuti oleh Priangan Timur, begitu juga di antara kabupaten-kabupaten di Priangan Timur pun berbeda. Misalnya, Kabupaten Bandung dan Cianjur lebih produktif daripada Kabupaten Parakanmuncang dan Sumedang.

Meskipun kewajiban memperluas tanaman kopi dan meningkatkan produksinya sudah berlangsung lama, bahkan sejak periode VOC, tapi dampak regionalnya tidak sama. Perbedaan jumlah total pohon dan produksi kopi di antara kabupaten-kabupaten di Keresidenan Priangan antara lain disebabkan karena perbedaan ketinggian (*altitude*) dari masing-masing kabupaten dan tingkat kecocokan serta kesuburannya. Sebagai contoh konkret dari perbedaan ini dapat dilihat jumlah pohon kopi di tiap kabupaten di Keresidenan Priangan pada tahun 1832 – 1864 (Tabel 2).

Perbedaan jumlah pohon kopi paralel dengan perbedaan jumlah produksinya. Semakin banyak jumlah pohon kopi, semakin banyak pula produksinya. Kabupaten Bandung merupakan kabupaten terbanyak jumlah pohon kopinya, kemudian disusul oleh Cianjur, Sumedang, Limbangan, dan Sukapura (lihat tabel 3). Alasan di balik angka ini adalah faktor natural dan struktural. Faktor pertama berarti bahwa kabupaten-kabupaten di sebelah selatan tidak begitu cocok untuk tanaman kopi. Faktor kedua berarti bah-

Tabel 3. Perbandingan Produksi Kopi di Kabupaten-Kabupaten Keresidenan Priangan (1820-1835) (dalam pikul [125 pond Amsterdam])

Tahun	Kabupaten					Total
	Cianjur	Bandung	Sumedang	Limbangan	Sukapura	
1820	10.487	17.311	5.917	4.570	0	38.285
1822	24.837	26.931	17.542	17.264	0	86.574
1824	18.512	23.172	13.890	10.102	0	65.676
1826	24.770	24.473	16.278	15.312	0	80.833
1828	42.109	23.139	15.328	14.206	0	94.782
1830	18.748	22.084	11.693	9.649	0	62.174
1832	11.543	22.328	9.560	9.805	0	53.236
1834	46.711	74.428	20.122	18.045	717	160.023

Sumber: "Statistiek der Residentie Preanger Regentschappen 1837", *Preanger* 29a/1 1837, ANRI.

wa kabupaten-kabupaten yang terletak jauh dari pusat pemerintahan keresidenan, sehingga pengawasan tanaman kopi tidak seintensif kabupaten-kabupaten yang dekat ke pusat keresidenan.

Organisasi Produksi

Secara umum keberhasilan tanaman kopi di Priangan bukan hanya berkat faktor ekologis, seperti kecocokan dan kesuburan tanah, tapi juga bagaimana praktik penanaman dioperasikan oleh sebuah sistem yang dipercaya oleh Pemerintah Kolonial, yang dibangun di atas bentuk-bentuk tradisional seperti penyerahan upeti dan *pancen (forced labour)* (van Baardewijk, 1994: 152). Pemerintah Kolonial Belanda tidak berhubungan langsung dengan penduduk desa dan tidak mencampuri pelaksanaan penanaman. Pemerintah Kolonial Belanda menyerahkan hampir seluruh aspek produksi kopi ke tangan penduduk pribumi, baik petani penanam maupun pemimpin lokal.

Akibatnya, penanaman kopi tetap berada di luar pengawasan langsung pemerintah kolonial. Semua regulasi yang berkaitan dengan tanaman kopi, termasuk distribusi beban dan tugas-tugas lainnya, merupakan urusan administrasi desa. Pemimpin lokal mulai dari para bupati hingga kepala-kepala desa bertanggung jawab mengorganisasikan aktivitas kesehariannya. Bahkan antara bupati dan kepala desa, dua kekuatan formal administrasi pemerintahan lokal terdapat satu rangkaian pemimpin perantara (*inter-*

mediary heads) yang memiliki pengaruh nyata pada implementasi sistem eksploitasi di wilayah ini (van Baardewijk, 1994: 152). Di tangan-tangan merekalah tanaman kopi dioperasikan, termasuk perihal pengadaan tambahan tenaga kerja dan perluasan lahan tanam. Mereka menunjuk lahan untuk tanaman kopi, mengumpulkan dan mengatur tenaga kerja, serta mengawasi penanaman dan panen (Clarence-Smith, 1994: 245). Dalam hal ini, cara yang dilakukan tidak berbeda dengan yang diorganisasikan pemerintah kolonial melalui *corvee services (herendiensten)*, yaitu pelayanan yang tidak dibayar untuk semua jenis proyek dan pekerjaan yang mengerahkan tenaga rakyat (Fasseur, 1975: 29).

Sedikit diketahui model produksi kopi yang mana yang pertama kali dijalankan di Priangan di antara model-model: perkebunan regular, kopi hutan, kopi pagar, dan kopi kampung. Akan tetapi, tampaknya, model kopi pagar merupakan cara yang paling awal dilakukan; selanjutnya tanaman kopi terkonsentrasi pada sistem perkebunan. Perubahan ini agaknya terjadi sejak akhir tahun 1840-an. Perbedaan jenis produksi itu cukup berpengaruh baik terhadap masalah administrasi maupun terhadap masalah-masalah lainnya, seperti pengadaan tenaga kerja, distribusi tenaga kerja, transportasi, dan sebagainya (van Baardewijk, 1994: 158).

Penanaman kopi di perkebunan yang lokasinya jauh dari desa merupakan

praktik penanaman yang memberatkan petani, tapi pemerintah menyukainya, karena kapasitas produksinya lebih besar dan waktunya lebih pendek. Jarak dari desa tempat tinggal petani-penanam ke perkebunan kopi bervariasi antara 10, 20, dan 34 *pal*. Oleh karena itu, penanam kopi harus mendirikan *pangkalan* atau *pratak* (*shelters*) di tengah-tengah perkebunan, sehingga mereka dapat tinggal di perkebunan ketika masa-masa persiapan, panen, dan pengangkutan hasil panen (A.V. Priangan, 30/3, 1852, ANRI). Untuk mempersiapkan perkebunan kopi, petani yang ditunjuk dimobilisasi bersama-sama. Mereka membersihkan tanah dari semak-semak belukar dan pohon-pohon besar, mencangkulnya, menyingingnya, membuat *sengked* (*terraced*), dan memagari lahan yang sudah dibersihkan, sebelum kemudian menanamnya. Pekerjaan pertama ini biasanya dilakukan selama musim kemarau, tetapi terus bersambung ke permulaan musim hujan. Selama fase awal ini rumah tangga penanam kopi dituntut untuk tinggal sementara di *saung-saung* untuk menghemat waktu dan tenaga (Elson, 1994: 65; M.R. Fernando, 2003: 166; Frans van Baardewijk, 1994: 160-167). Kopi hutan ditanam secara sederhana di tanah-tanah yang cocok, biasanya hanya dengan cara membersihkan rerumputan dan membakarnya sebelum penanaman dimulai. Setelah itu, tanaman secara periodik disiangi dan dibersihkan dari rerumputan liar. Kopi pagar juga tidak rumit; umumnya ditanam di lingkungan penduduk yang menetap, baik di kebun-kebun dekat rumah atau pun di tanah-tanah desa. Pemeliharaan tanaman kopi model ini melibatkan kaum wanita dan anak-anak, khususnya dalam memanen dan memrosesnya. Sedikit buruh diperlukan untuk membersihkan tanah dan menyingingnya terutama dari pohon-pohon yang tinggi (Elson, 1994: 65-66; W.G. Clarence-Smith, 1994: 252). Banyak juga pohon kopi ditanam di tanah-tanah yang sempit di desa-desa. Oleh karena itu, model ini dikenal dengan sebutan kopi kampung.

Di antara model-model tersebut, model mana yang paling populer di Keresidenan Priangan? Paling tidak, didasarkan pada masing-masing model, sepanjang abad ke-19, terdapat perbedaan kecenderungan pada tiap-tiap dekade itu. Pada tahun 1830-an dan awal 1840-an model kopi pagar/kopi kampung dan kopi hutan yang sangat populer. Pada tahun 1837 di kabupaten-kabupaten Bandung dan Sumedang lebih dari 50% pohon kopi adalah kopi pagar dan kopi hutan; sedangkan di Kabupaten Sukapura lebih dari 63% merupakan kopi hutan. Pada tahun 1839 peningkatan jumlah kopi pagar atau kopi kampung terjadi di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Sumedang, dan Sukapura berturut-turut 55,71 %, 55,48 %, and 53 %.

Pada permulaan periode 1850-an, kontras dengan periode-periode sebelumnya, tanaman kopi sangat terpusat pada model perkebunan, bahkan untuk tahun 1857 – 1868 lebih dari 80% pohon kopi adalah kopi perkebunan. Sebagai perbandingan, pada tahun 1870 kopi hutan sangat populer di Keresidenan Pasuruan; bahkan pada tahun 1875 sebanyak 2/3 kopi di Keresidenan Pasuruan ditanam dengan model tersebut (Elson, 1994: 65-66; W.G. Clarence-Smith, 1994: 252), sementara kopi pagar banyak dipraktikkan di Keresidenan Kedu dan Banyumas (van Baardewijk, 1994: 167).

Selain kopi pemerintah (*government coffee*) di Keresidenan Priangan pun berkembang perkebunan-perkebunan kopi swasta. Meskipun banyak disebutkan bahwa pengusaha-pengusaha swasta mulai menanam tanaman ekspor pada tahun 1870-an sebagai konsekuensi dari penerapan Politik Ekonomi Liberal, namun di Keresidenan Priangan partisipasi perusahaan swasta sudah dimulai sejak awal abad ke-19. Sejak dekade pertama abad ke-19 kopi ditanam di tanah-tanah pribadi, yaitu di Ujungberung (Kabupaten Bandung), Gunung Parang, dan Ciputri (Kabupaten Cianjur). Pada tahun 1813 tanaman kopi swasta telah mulai berproduksi, meskipun hanya menyumbang 7% dari total produksi kopi dari seluruh

Keresidenan Priangan (*A.V. Preanger* 34/1, 1840, ANRI) (lihat TABEL 4.19).

Pada tahun 1840 tanaman kopi swasta meningkat tajam di semua kabupaten di wilayah Priangan, kecuali Tasikmalaya. Lebih dari 70 juta pohon kopi ditanam, dan pada tahun 1853 diproduksi sebanyak 321.610 *pikul*. Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang sangat populer dengan kopi swastanya. Di tempat itu 75% pohon kopinya adalah kopi swasta (*Archieve Minister van Kolonien*, 1850-1900 [Inv. Nr. 27], 14 February 1856, ARA). Kemudian, pada tahun 1870-an tanaman kopi swasta, baik pada tanah *huur* maupun *erfpacht*, berjumlah sebanyak 58 perkebunan yang mencapai luas 20.249 *bau* dan tersebar di hampir seluruh *afdeeling* di Keresidenan Priangan

Pada waktu yang sama pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat pribumi untuk membuka perkebunan kopi yang kemudian disebut sebagai *vrijwillig*, *merdeka* atau *manasuka tuinen* (perkebunan bebas). Pada tahun 1874 dilaporkan bahwa di delapan *afdeling* Keresidenan Priangan terdapat 382 petani pribumi yang menanam kopi seluas 4.729 *bau* (*Koloniaal Verslag*, 1875).

Buruh

Berapa besar beban yang dituntut untuk mengerjakan tanaman kopi? Menurut perhitungan Direktur Penanaman, B.J. Elias, untuk perkebunan baru yang menanam 600 pohon, seorang petani-penanam (*planter*) harus bekerja 135 hari setahun untuk tiga tahun pertama. Beban itu praktiknya bervariasi untuk tiap wilayah. Sebagai contoh, di Kabupaten Galuh pada tahun 1857-1862, Bupati R.A.A. Kusuma di Ningrat menghitung bahwa di kabupatennya pekerjaan yang dituntut untuk menanam dan memelihara 500 pohon kopi sesuai dengan aturan pemerintah berjumlah kira-kira 115 hari dalam satu tahun (Frans van Baardewijk, 1994: 163). Elson telah mengumpulkan berbagai estimasi seperti pada jumlah hari bekerja dari rumah tangga buruh, mulai dari 53 hari per tahun di Semarang pada tahun 1856 sampai 124 hari di Tegal pada

tahun 1865. Pada tahun 1871 perkiraan berkisar dari 100 hingga 240 orang per hari. Rumah tangga biasanya diberi alokasi 600 pohon di perkebunan reguler dan/atau kopi hutan, tapi hal ini sangat bervariasi. Antusiasme para pejabat di Mojokerto telah membebani rakyatnya dengan rata-rata 1.674 pohon tiap rumah tangga pada tahun 1837 (Elson, 1994: 65, 89, 205, 231; W.G. Clarence-Smith, 1994: 255).

Di Priangan beban penanaman kopi sangat beragam di antara kabupaten-kabupaten, begitu juga di antara periode waktu. Pada tahun 1820-an penduduk yang terlibat pada tanaman kopi paksa pemerintah (*government's forced coffee*) hanya kira-kira 33,70% yang bertanggung jawab atas rata-rata 534 pohon kopi (*A.V. Preanger* 29a/7, 1828, ANRI). Pada tahun 1830-an persentase penduduk yang terlibat dan jumlah pohon yang harus dipelihara meningkat; pada tahun 1837 sebanyak 62,74% dan 1.275 pohon; dan pada tahun 1839 sebanyak 64,36% dan 1.092 pohon ("Statistiek der Residentie Preanger Regentschappen 1837", *Preanger* 29a/1 1837, ANRI.; *A.V. Preanger* 34/1, 1839, ANRI). Pada tahun 1852 tiap rumah tangga diwajibkan menanam kopi sebanyak 1000 pohon dan bekerja rata-rata 100 hari tiap tahun (*A.V. Preanger* 30/3 1852, ANRI). Pada tahun 1852 sebanyak 113.447 rumah tangga di Priangan terlibat dalam tanaman paksa kopi, lebih banyak 39.782 rumah tangga daripada di tahun 1837. Pada tahun 1859 tiap rumah tangga menanam dan memelihara tidak lebih dari 600 pohon (*A.V. Preanger* 5/1 1859, ANRI). Pada tahun 1864 rumah tangga penanam sebanyak 63,32%, masing-masing dari mereka memelihara 600 pohon (*A.V. Preanger*, 30/6, 1864, ANRI).

Menurunnya petani penanam dan jumlah tanaman kopi pemerintah di seluruh Priangan agaknya sudah tampak sejak 1850-an. Menurunnya pohon kopi secara drastis terjadi pada tahun 1870-an, sehingga pada tahun 1874 satu rumah tangga hanya memelihara kopi pemerintah rata-rata sebanyak 220 pohon. Sejak tahun 1876 jumlah kopi pemerintah

secara perlahan meningkat lagi.

Pembayaran (*Crop Payment*)

Instrumen yang merangsang petani untuk menanam kopi dan meningkatkan produksinya adalah pembayaran hasil tanaman; sedangkan untuk meningkatkan keterlibatan pemimpin lokal dan administrasi kolonial adalah penerapan persentase penanaman yang telah memberi keuntungan finansial secara langsung kepada para pejabat.

Secara teoretis, respons petani untuk menanam kopi tergantung pada pembayaran harga kopi dan pembayaran upah kerja; sedangkan pembayaran tanaman lokal mengikuti fluktuasi harga-relatif kopi dunia. Teori semacam itu tidak selalu terjadi di Priangan. Meskipun petani Priangan enggan melakukan pekerjaan yang tidak memberi imbalan finansial yang memadai, mereka tidak dapat menghentikan penanaman kopi, karena ini merupakan tanaman wajib. Oleh karena itu, anggota rumah tangga yang diwajibkan menanam kopi meningkat hingga mencapai jumlah hampir 60% dari seluruh rumah tangga petani di seluruh Jawa sepanjang dekade kedua abad ke-19. Jawa Barat di mana Priangan merupakan wilayah inti memiliki lebih banyak petani-penanam daripada Jawa Tengah dan Jawa Timur (Fernando, 2003: 169).

Antusiasme rumah tangga petani dalam menanam kopi, nyatanya, agak menurun ketika harga belinya murah; namun masih ada alasan lain antusiasme petani menanam kopi yaitu dikaitkan dengan tingkat kebutuhan akan uang kontan. Untuk meningkatkan pemasukan uang, mereka mendapatkannya melalui kopi. Kopi pada suatu waktu merupakan sumber untuk mendapatkan uang secara *cash*, terutama untuk petani yang dapat menanamnya pada lahan berskala kecil di hutan dan kopi kampung yang terletak dekat dengan rumah mereka.

Terdapat tiga kecenderungan perkembangan harga kopi di Keresidenan Priangan. Pada abad ke-18, yang merupakan periode awal ketika tanaman kopi diperkenalkan, harga kopi cenderung

mengikuti harga pasar dunia. Setelah itu, pada abad ke-19 pemerintah membeli kopi dengan harga yang ditetapkan sangat rendah. Tiga dekade menjelang akhir abad ke-19 pemerintah mulai menaikkan harga kopi. Dalam kenyataannya, fluktuasi harga itu tidak memiliki korelasi positif dengan ekspansi jumlah pohon dan naiknya produksi, karena hal itu sudah konsekuensi dari sifat paksa tanaman kopi. Kalaupun fluktuasi produksi terjadi, itu bukan disebabkan oleh fluktuasi harga beli, tapi lebih karena faktor-faktor alamiah, seperti cuaca yang terlalu panas atau dingin.

Pada tahun 1711 ketika Bupati Cianjur, Aria Wiratanu, menawarkan pengiriman pertama kopi kepada VOC, ia menuntut bahwa harga ditetapkan *delapan heavy* (atau dalam ukuran Asia, *sepuluh light*) *stuiver* per pon. Menurut surat tertanggal 23 Juli 1711, *Heeren XVII* (Dewan Pimpinan VOC) akan membayar delapan atau bahkan 15 *stuiver* per pon. Untuk suatu waktu pasokan tetap tak berarti, maksimal hanya beberapa ribu pon. Harga setinggi itu tampaknya menarik petani Priangan sehingga menjelang akhir tahun 1720 produksi kopi mencapai 100.000 pon. Pada tahun 1724 sejumlah ekspansi produksi di Priangan memunculkan kekhawatiran pada *Heeren XVII* di Negeri Belanda dan Pemerintahan Kolonial di Batavia terhadap terjadinya produksi berlebih. Kekhawatiran itu terjadi tidak lama setelah harga kopi di pasar Eropa stagnan; di Negeri Belanda sendiri hanya f.1,00 per pon.

Oleh karena itu, *Heeren XVII* menuntut pengurangan harga. Pada tahun 1725 Pemerintah Kolonial di Batavia mengurangi harga kopi di Priangan Barat dari 12 *rixdollar* menjadi sembilan *rixdollars* untuk satu *pikul* (125 pon); harga untuk Priangan Timur dikurangi sampai 10 *rixdollars* per *pikul*. Pada 15 Januari 1726 sebuah keputusan tentang harga kopi ditetapkan di Batavia; tiap *pikul* dari Priangan dihargai lima *rixdollar*. Ini berarti harga kopi hanya 2½ *stuiver* per pon (Knaap, 1986: 41). Meskipun harga kopi di Jawa, di luar Priangan, lebih tinggi da-

ripada harga kopi di Priangan, namun hal itu tetap mengindikasikan tendensi yang sama.

Alasan lain menerapkan penurunan harga adalah mengamankan ketahanan pangan, finansial, dan politis. Kopi Priangan pada masa-masa ketika VOC membayar dengan harga yang baik mendapat respons yang baik. Petani penanam, disebutkan, menjadi senang dengan pengalaman baru mendapatkan uang, dan bahkan dikhawatirkan mereka enggan menanam padi, karena mereka merasa tercukupi segala kebutuhannya dengan sedikit kerja tapi mendapat uang banyak dari kopi. Namun, ketika pada tahun 1726 Pemerintah Kolonial di Batavia kekurangan uang dan mendengar bahwa beberapa bupati telah menggunakan uang hasil persentase kopi untuk membeli senjata, secara drastis VOC mengurangi harga beli kopi. Lebih dari itu, *Heeren XVII* takut bahwa pada akhirnya Priangan akan memegang monopoli dalam produksi kopi. Monopoli semacam itu akan mengamankan pemasukan uang yang sangat banyak kepada produsen kopi Priangan. Priangan Barat, misalnya, pada tahun 1725 memproduksi lebih dari 3.150.000 pon kopi dan Priangan Timur memproduksi 650.000 pon, masing-masing menerima uang sebesar f.733.000 dan f.280.000. Akibatnya, wilayah-wilayah itu mungkin menjadi pusat kekuatan politik yang penting. Munculnya pusat kekuasaan seperti itu yang secara geografis dekat ke Batavia mesti diwaspadai (Knaap, 1986: 41).

Merespons penurunan harga kopi di wilayah Priangan tidak dirasakan sama di tiap daerah. Produksi kopi di Priangan Timur bahkan meningkat. Pada tahun 1730 Priangan Timur memproduksi hampir sebanyak produksi di Priangan Barat (Knaap, 1986: 43). Penduduk Keresidenan Priangan terus melanjutkan penanaman kopi, meskipun keuntungan bagi produsen kopi jarang atraktif lagi. Pada tahun 1729-1730, bahkan ribuan pohon baru ditanam di Priangan Tengah (Knaap, 1986: 43). Di Jawa Barat, secara umum, pada pertengahan kedua abad ke-19 produk kopi yang disampaikan ke gudang-gudang

pemerintah bahkan meningkat, meskipun harga kopi tidak lebih dari f.2.42 per *pikul* (van Meerten. 1887: 26).

Hingga tiga dekade pertama abad ke-19 tanaman kopi-paksa tetap berlaku di Keresidenan Priangan. Kewajiban menyerahkan kopi kepada pemerintah dipaksakan kepada rakyat keresidenan lain pada tahun 1833 ketika Gubernur Jenderal van den Bosch mengeluarkan resolusi pada tanggal 3 Februari (*Indische Staatsblad*. 1833, no. 7). Sebelumnya, petani dari keresidenan lain memelihara tanaman-tanaman kopi dan mereka bebas menentukan sebagaimana yang mereka ingin hasilkan. Akibatnya, kebanyakan kopi mereka dijual kepada pembeli-pembeli swasta (Fasseur, 1975: 36).

Van den Bosch tidak memasukkan tanaman kopi sebagai subjek Sistem Tanam Paksa sejak awal sistem ini diterapkan (1830). Paling tidak, ada tiga alasan untuk menjelaskannya. Pertama, harga kopi pada tahun 1830-an rendah. Kedua, ia ingin membatasi rencana bahwa kebijakan-kebijakan barunya di Jawa hanya didasarkan pada paksaan. Ketiga, tidak ada keuntungan segera (*immediate advantage*) dengan mengecualikan tanaman kopi pada kebijakan-kebijakan ini (Elson, 1994: 63).

Dalam periode ini terdapat tiga kategori kebijakan harga kopi yang sangat berkaitan dengan kewajiban penyerahan pajak/sewa tanah (*land rent*) kepada pemerintah. Tiga kategori itu direpresentasikan dalam tiga model keresidenan yang berbeda dalam hal praktik penyerahan sewa tanah, yaitu: pertama, Keresidenan Priangan; kedua, Keresidenan-keresidenan Madiun, Kediri, Pacitan, Banyuwangi; dan ketiga, selebihnya (selain model satu dan dua).

Harga kopi di Keresidenan Priangan hingga tahun 1873 sangat rendah dan selalu di bawah harga standar, karena di keresidenan ini tidak ada sewa tanah, termasuk pada tanah yang tidak ditanamai kopi (*non-coffee land*) yang ditarik oleh Pemerintah Kolonial, kecuali pajak-pajak khusus yang ditarik oleh pemimpin-pemimpin tradisional (van

Baarderwijk, 1993:2 46). Tidak diketahui alasan resmi mengapa sistem sewa tanah tidak diperkenalkan di Keresidenan Priangan. Diduga adalah karena petani di keresidenan ini memiliki terlalu sedikit sumber yang bisa dijadikan subjek pajak moneter yang reguler. Alasan lain, dan ini dianggap alasan yang lebih kuat, adalah karena takut mengganggu sistem kopi Priangan yang sangat menguntungkan itu (Elson, 1994: 47). Sebelum tahun 1837, misalnya, pembayaran untuk kopi hanya antara f.2,42 hingga f.2,92½ per *pikul* (van Meerten, 1887: 26; C. Fasseur, 1975: 38), sementara di Surakarta dan Yogyakarta f.18,33 dan di daerah Jawa lainnya seharga f.10,00 (Laerne, 1885: 536-537).

Van den Bosch melalui resolusi tanggal 3 Februari 1833 menginginkan suatu keuntungan yang tinggi dari harga minimum kopi, dan ini dikaitkan dengan beban pajak. Tujuan sesungguhnya adalah bahwa setiap jenis sewa tanah harus dikurangi dari pembelian kopi. Bentuk seperti ini hanya berlaku di daerah-daerah yang lebih jauh dan pinggir seperti Pacitan, Madiun, Kediri, dan Banyuwangi. Petani di keresidenan-keresidenan itu harus menanam sejumlah besar pohon kopi tiap rumah tangga. Mereka juga menerima uang yang sedikit dari penjualan kopi mereka daripada di keresidenan-keresidenan lain, di tempat-tempat itu sewa tanah untuk setiap kategori tanah dikurangi dari pembayaran kopi. Pada tahun 1837, misalnya, ketika di Priangan harga kopi sekitar f.3,13 per *pikul*, di Pacitan, Madiun, dan Kediri seharga f.6,25; dan harga itu turun lagi menjadi f.5,21 per *pikul* pada tahun 1844. Untuk waktu yang lama, penghasilan mereka mungkin lebih besar jika mereka menerima pembayaran lebih tinggi untuk tanah kopi mereka, dan kemudian dibayar sewa tanah pada tanah non-kopi secara terpisah (Laerne, 1885: 536-37.; Cf. W.G. Clarence-Smith, 1994: 246; C. Fasseur, 1975: 36). Di Madiun, Pacitan, dan Kediri kebijakan seperti itu berakhir pada tahun 1859; dan di Banyuwangi pada tahun 1873.

Di seluruh keresidenan lain yang jadi subjek tanam paksa, pembayaran kopi

mencerminkan harga pasar di Batavia, yang pada waktu itu ditetapkan f.25,00 per *pikul* (125 pon). Dari harga per pikul itu pemerintah mengurangnya sebesar 40% untuk sewa tanah yang digunakan untuk tanaman kopi; dan, selanjutnya, mengambil sebesar f.3,00 untuk biaya pengangkutan kopi dari gudang di pedalaman ke gudang di dekat pantai; selain itu, karena takut terjadinya penyusutan (*short-changed*) dalam pengantaran, pemerintah masih mengambil untuk setiap pikul kopi 2%. Akibatnya, penanam hanya menerima kurang dari separuh dari harga yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah, yaitu f.12 per *pikul* (Fasseur, 1975: 36-37; R.E. Elson, 1994: 63; W.G. Clarence-Smith, 1994: 247). Oleh karena itu, pengaturan terhadap harga pasar seperti itu berarti resolusi itu tidak sesuai dengan praktiknya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa harga kopi dibayar di bawah harga kopi dunia, dan bahkan Pemerintah Kolonial mendapatkan margin keuntungan yang tinggi dari penjualan kopi di Negeri Belanda. Kebijakan baru itu secara finansial berhasil memenuhi harapan-harapan politisi Belanda, dan terus begitu hingga tahun 1870-an. Pada titik ini, prinsip dasarnya secara politik sampai pada hal yang tidak bisa diterima, dan kebijakan-kebijakan itu digantikan oleh seperangkat ide kaum Liberal. Namun, paksaan dalam sektor kopi terus berlangsung lebih lama daripada jenis tanaman lainnya (Fernando, 2003: 160).

Sungguh, pada tahun 1870 kesempatan ekonomi baru terbuka luas dan harga kopi dunia meningkat lebih tinggi. Meskipun hal itu memengaruhi lebih tingginya harga pembelian kopi petani, namun harga kopi yang ditetapkan pemerintah tetap tidak realistis. Pada tahun 1870, produsen menerima f.13,00 per *pikul*, ketika harga rata-rata penjualan di Jawa sebesar f.33,00. Pada tahun 1874 harga penjualan di Amsterdam hampir f.64,00 dibandingkan dengan f.14,00 yang diterima oleh petani-penanam (Clarence-Smith, 1994: 248).

Persentase Tanaman

Instrumen lain yang cukup efektif untuk meningkatkan perkembangan dan membuat para pejabat semangat untuk bekerja sama dalam memperkenalkan dan memperluas tanaman-tanaman pemerintah, selain harga, adalah persentase tanaman, yaitu pemerintah memberikan pembayaran insentif baik kepada pejabat Eropa maupun pribumi yang proporsional dengan jumlah kopi, indigo, dan yang lainnya yang dihasilkan di keresidenan atau wilayah tempat mereka bekerja (Fasseur, 1975: 44; Elson, 1994: 182). Semakin tinggi tingkat produksi, semakin besar keuntungan yang mereka peroleh. Bagi mereka yang berhasil meningkatkan produksi, imbalan yang diperolehnya pun semakin tinggi; sering terjadi, bahkan, pembayaran dari persentase itu lebih besar daripada pendapatan resmi (gaji).

Oleh karena itu, sesungguhnya dapat dikatakan bahwa persentase tanaman memiliki fungsi ganda. Pada satu sisi, sebagaimana diketahui bahwa implementasi tanaman kopi di Priangan hampir sepenuhnya berada di tangan penguasa pribumi, yang mana mereka tidak menerima gaji dari keuangan pemerintah; karena tidak ada sewa tanah ditarik dari keresidenan ini. Alternatifnya, persentase-persentase itu dapat menyemangati para

pejabat lokal untuk meningkatkan tanaman dan produksi.

Persentase tanaman dipraktikkan di Priangan, paling tidak, sejak awal periode Pemerintah Kolonial Belanda. Pembayaran persentase kopi kepada para bupati dan bawahannya di Keresidenan Priangan diatur dalam Dekrit tahun 1808 (Fasseur, 1975: 248). Pada tanggal 17 Maret 1810 Daendels menetapkan besaran tarif persentase tanaman dan menetapkan siapa yang berhak menerimanya. Berdasarkan ketetapan itu terdapat sembilan orang yang berhak menerima persentase tanaman, yaitu bupati, *patih*, dua orang *ngabehi*, kepala distrik (*cutak*), dua komis (*commissioners*), *mandor cutak*, camat, sekretaris, dan *lengser* (lihat tabel 4).

Selain itu, Pemerintah Kolonial pada tanggal 17 Juni 1811 menunjuk sembilan kontroleur untuk tanaman kopi. Kepada mereka pun dibayarkan persentase tanaman. Kesembilan kontroleur itu berada di Buitenzorg, Cianjur, Sukaraja, Rongga, Bandung, Tarogong, Pankanmuncang, Sukapura, dan Sumedang. Masing-masing dari mereka menerima sebesar 12 *stuivers* untuk penyerahan satu *pikul* kopi (126/128 pon) ditambah penghasilan tahunan sebesar antara 1.500-2.000 *rixdollars* (uang perak) (Van der Chijs, 1897: 591-594). Pada periode

Tabel 4. Persentase Kopi di Keresidenan Priangan Tahun 1810

No.	Pejabat yang Memperoleh Persentase	Tarif Persentase Kopi
1	Bupati	12 <i>stuivers</i> tiap pikul kopi (126/128 A.p.)
2	Patih	1 <i>stuiver</i> untuk semua penyerahan kopi ke kabupaten.
3	Dua orang Ngabehi	1 <i>stuiver</i> untuk semua penyerahan kopi ke kabupaten.
4	Cutak (kepala distrik)	4 <i>stuivers</i> untuk penyerahan kopi dari tiap cutak
5	Dua komis	2 <i>stuivers</i> untuk penyerahan kopi dari tiap cutak
6	Mandors cutak	2 <i>stuivers</i> untuk penyerahan kopi dari tiap cutak
7	Camat	1 <i>stuiver</i> untuk penyerahan kopi di ke-cutak-annya
8	Sekretaris	½ <i>stuiver</i> untuk semua penyerahan kopi
9	Lengser	½ <i>stuiver</i> untuk semua penyerahan kopi

Sumber: J.A. van der Chijs, 1897. *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, 1602-1811*. Zestiende deel 1810-1811. Batavia-'s Hage: Landsdrukkerij-M.Nijhoff, hlm. 133-134.

Tanam Paksa, Van den Bosch sangat mendukung persentase tanaman itu (*cultivation percentage*); bahkan tidak hanya kepada penguasa-penguasa pribumi, tapi juga kepada pejabat-pejabat Eropa; dan hal ini cukup berpengaruh terhadap keresidenan-keresidenan lain. Ia berpendapat bahwa memperkenalkan persentase tanaman adalah *fair* karena tanaman-tanaman pemerintah, tentu saja pada permulaannya, menyebabkan para pejabat berkepentingan akan adanya ekstra kerja (Fasseur, 1975: 248).

Pada tahun 1836 untuk penyerahan kopi minimum 90.000 *pikul*, para pejabat di Priangan menikmati persentase sebagai berikut.

Tabel 5. Tarif Persentase Kopi di Keresidenan Priangan Tahun 1836

Pejabat	Persentase Tanaman untuk Tiap Pikul (125 pon)
Bupati	f.1,20
Pejabat Bawahan Bupati	48 sen
Residen	6 sen
Asisten Residen	6 sen
Kontrolleur	6 sen

Sumber: "Statistiek der residentie Preanger Regentschappen 1837", *Preanger* 29a/1 1837, ANRI.

Persentase kopi keseluruhan yang mereka terima pada tahun 1836 adalah f.205.487,70 (Tabel 6). Hingga tahun 1850-an dan 1860-an jumlah pejabat yang menikmati persentase kopi dan besaran tarifnya cukup stabil; total pemasukan persentase tiap tahun tidak selalu sama, tapi bergantung pada jumlah produksi yang diserahkan ke gudang-gudang pemerintah. Terdapat perbedaan besar dalam persentase tanaman yang dibayarkan di antara bupati-bupati dan para bawahannya di Pulau Jawa. Selama periode tahun 1858 - 1960, sebagai perbandingan, empat bupati di Banten menerima tiap tahun rata-rata tidak kurang dari f.2.500, tapi lima

bupati tetangganya, yaitu di Keresidenan Priangan menerima tidak kurang dari f.90.000, atau 36 kali lebih banyak daripada yang diterima para bupati Banten. Lima bupati di Keresidenan Surabaya menerima f.26.000 tiap tahun; tiga bupati di Keresidenan Pasuruan menerima f.38.000, dan empat bupati di Keresidenan Rembang menerima f.3.600 (Fasseur, 1975: 248).

Tabel 6. Tarif Persentase Kopi di Keresidenan Priangan Tahun 1836

Pejabat	Persentase Kopi untuk Tiap Pikul (125 pond, dalam f.)
Lima Bupati	128.757,83
Pejabat Bawahan Bupati	73.103,09
Residen	933,81
Asistan Residen	933,81
Kontrolleur Kelas I	933,81
Kontrolleur Kelas II	825,35
T o t a l	205.487,70

Sumber: "Statistiek der residentie Preanger Regentschappen 1837", *Preanger* 29a/1 1837, ANRI.

SIMPULAN

Ada beberapa karakter tentang kopi Priangan. Tanaman tersebut merupakan tanaman wajib. Harga jual kopi Priangan pada abad ke-19 tidak mengikuti harga pasar, tapi ditetapkan oleh pemerintah yang kecenderungannya di bawah harga pasar. Dengan demikian, margin keuntungan yang diperoleh petani tidak besar. Namun demikian, petani tetap semangat menanamnya bukan hanya karena kopi sebagai tanaman wajib, tapi juga melalui kopilah petani dapat dengan mudah mendapatkan uang. Pada sisi lain ketahanan pangan mereka tidak terganggu karena perolehan produksi padi yang sudah mencukupi. Rendahnya harga jual kopi Priangan pun bisa dipahami karena petani Priangan abad ke-19 tidak dipungut pajak tanah. Jadi, rendahnya harga kopi

sebagai kompensasi atas bebasnya mereka dari beban pajak. Pada sisi lain, kesetiaan petani menanam kopi berkaitan dengan keterlibatan para pemimpin lokal dalam organisasi produksi. Elite lokal ini sangat berkepentingan dengan suksesnya produksi kopi karena ada pengaruh finansial (melalui *cultuur procenten*) dan promosi karir di pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Archive Minister van Kolonien*, 1850-1900 [Inv. Nr. 27], 14 February 1856, ARA
- Algemeen Verslag Preanger* 29a/7, 1828, ANRI.
- Algemeen Verslag Preanger*, 29a/19, 1932, ANRI.
- Algemeen Verslag Preanger* 36/3, 1835, ANRI.
- Algemeen Verslag Preanger*, 2/7, 1935, ANRI.
- Preanger* 29a/1 1837, ANRI.
- Algemeen Verslag Preanger* 7/1, 1837, ANRI.
- Algemeen Verslag Preanger* 34/1, 1839, ANRI.
- Algemeen Verslag Preanger* 34/1, 1840, ANRI.
- Algemeen Verslag Preanger* 30/6, 1864, ANRI.
- Algemeen Verslag Preanger* 29a/1 1837, ANRI.
- Algemeen Verslag Preanger* 30/3 1852, ANRI
- Algemeen Verslag Preanger* 5/1 1859, ANRI
- Bulbeck, David et al. 1998. *Southeast Asian Exports since the 14th Cloves, Pepper, Coffee, and Sugar*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- van der Chijs, J.A. 1897. *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, 1602-1811*. Zestiende deel 1810-1811. Batavia-'s Hage: Landsdrukkerij-M.Nijhoff.
- Clarence-Smith, William Gervase dan Steven Topik. 2003. *Coffee Economy in Africa, Asia, and Latin America, 1500-1898*. Cambridge University Press.
- Elson, R.E. 1994. *Village Java under the Cultivation System 1830-1870*. Sydney: Allen and Unwin.
- Fasseur, C. 1975. *The Politics of Colonial Exploitation in Java; The Dutch and the Cultivation System*. Ithaca: New York.
- Fernando, M.R. 2003. "Coffee Cultivation in Java, 1830-1917", in William Gervase Clarence-Smith and Steven Topik. 2003. *Coffee Economy in Africa, Asia, and Latin America, 1500-1898*. Cambridge University Press.
- de Klein, Jacob Worter. 1931. *Het Preanger Stelsel (1677 – 1871) en zijn Nawerking*. Leiden.
- Indische Staatsblad*. 1833, no. 7, ANRI.
- Knaap, G.J. 1986. "Coffee for Cash; the Dutch East India Company and the Expansion of Coffee Cultivation in Java, Ambon and Ceylon 1700-1730" in J. van Gor (Ed.). *Trading Companies in Asia 1600-1830*. Utrecht: Hes Uitgevers (1986): 33 – 49.
- Koloniaal Verslag*, 1854, Bijlaag K, No. 12.
- Koloniaal Verslag* 1857, Bijlage N, No. 12.
- Koloniaal Verslag* 1860, Bijlage O, No. 14.
- Koloniaal Verslag* 1863, Bijlaag O, No. 17.
- Koloniaal Verslag* 1866, Bijlage IJ, No. 26.
- Koloniaal Verslag* 1869, Bijlage EE, No. 3 CC.
- Koloniaal Verslag* 1874, Bijlaag NN, No. 40.
- Koloniaal Verslag*, 1875.
- Koloniaal Verslag* 1877, Bijlaag M, No. 40.
- Koloniaal Verslag* 1881, Bijlage UU, No. 47.
- Koloniaal Verslag* 1883, Bijlage CCC, No. 55.
- Koloniaal Verslag* 1886, Bijlage VV, No. 47.
- Koloniaal Verslag* 1889, Bijlage UU, No. 47.
- Koloniaal Verslag* 1894 Bijlage ZZ, No. 52.
- Koloniaal Verslag* 1898, Bijlage SS, No. 45.
- Laerne K.F. van Delden. 1885. "Verslag over de Koffeecultuur in Amerika, Azie en Afrika", *Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie*. Negende deel. hlm. 539-540.
- Preanger Statistiek* 1836, ANRI.
- Preanger Statistiek*, *Preanger* 7/1 1839, ANRI.
- Statistiek der Residentie Preanger Regentschappen 1837*, ANRI.
- van Baardewijk, Frans. 1994. "The Cultivation System, Java 1834 – 1880", *Changing Economy in Indonesia*. Volume 14. Amsterdam: Royal Tropical Institute.
- van Meerten, Henri Charles. 1887. *Overzicht van de Hervorming van het Preangerstelsel*. Leiden: Goen.
- Stevens, Th. 1982. "Van der Capellen's Koloniale Ambitie op Java; Economisch beleid in een Stagnerende Conjunctuur." *Thesis Ph.D.* University of Amsterdam. Amsterdam: Historisch Seminarium.